

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UKURAN LEGISLATIF,
TINGKAT PENYIMPANGAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN TERHADAP
TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DI INDONESIA**

**(Studi Empiris pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Ridha Akbar Faruqi

No. Mahasiswa: 15312359

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UKURAN LEGISLATIF,
TINGKAT PENYIMPANGAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN TERHADAP
TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DI INDONESIA**

**(Studi Empiris pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Tahun 2016-2018)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Ridha Akbar Faruqi

No. Mahasiswa: 15312359

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta,

Penulis,



(Ridha Akbar Faruqi)

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UKURAN LEGISLATIF,
TINGKAT PENYIMPANGAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN TERHADAP
TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DI INDONESIA**

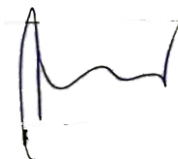
**(Studi Empiris pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Tahun 2016-2018)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

Nama: Ridha Akbar Faruqi
No. Mahasiswa: 15312359

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal.....
Dosen Pembimbing,



(Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UKURAN LEGISLATIF, TINGKAT
PENYIMPANGAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN TERHADAP TINGKAT
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA**

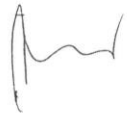
Disusun Oleh : **RIDHA AKBAR FARUQI**

Nomor Mahasiswa : **15312359**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Kamis, 03 Desember 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Abriyani Puspaningsih, Dra., M.Si., Ak.



Penguji : Marfuah, Dra., M.Si., Ak.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan persembahan saya yang tak seberapa untuk:

1. Bapak Budi Hartono dan Ibu Sayekti Wahyu Kuntari yang sangat saya cintai. Terima kasih telah tak henti-hentinya mendidik saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih untuk selalu menjaga nama saya dalam doa-doa Abi dan Umi dan mendukung apapun itu yang menjadi impian saya.
2. Adik saya Muhammad Fadhil Fauzan yang selalu saya banggakan. Terima kasih telah menjadi seseorang yang selalu ada untuk saya semenjak kita masih berlari-lari kecil hingga saat ini berjuang untuk langkah yang besar. Kejarlah mimpimu, dik!
3. Rizki Farah Laudina, terima kasih telah merubah kemurungan saya menjadi keceriaan. Terima kasih atas kehadiranmu yang selalu menunjukkan bahwa saya pasti bisa melalui semua ini.
4. Sahabat perantauan saya Fatur, Aidil, Ade Putra, dan Ade Kurnia, terima kasih atas kebersamaanya selama ini. Mungkin saat ini kita semua sudah mempunyai jalan masing-masing, tapi saya selalu yakin kita pasti bisa hidup!
5. Sahabat kecil saya Daka, Ari, Tegar, Bima, Nanda, dan Dhenny, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita suka maupun duka. *Keep fighting!!*
6. Semua yang telah mengisi kehidupan saya selama ini, terima kasih telah datang dan mewarnai kehidupan saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Tidak lupa shalawat serta salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh umatnya. Skripsi yang berjudul **“PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, UKURAN LEGISLATIF, TINGKAT PENYIMPANGAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA”** yang disusun penulis ini guna memenuhi syarat kelulusan Pendidikan Sarjana Srata-1 Akuntansi di Universitas Islam Indonesia.

Penulis merasa beruntung karena memperoleh bantuan dan dukungan selama penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Abriyani Puspaningsih, M.Si., Ak., selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa sabar dan dengan senang hati memberikan ilmu dan masukan kepada penulis.
2. Jajaran Rektor, Dekan, Dosen, serta karyawan Universitas Islam Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Srata-1 di Universitas Islam Indonesia.
3. Orang tua yang senantiasa mendukung penulis dalam meraih cita-cita.
4. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, penulis selalu berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

Ridha Akbar Faruqi



DAFTAR ISI

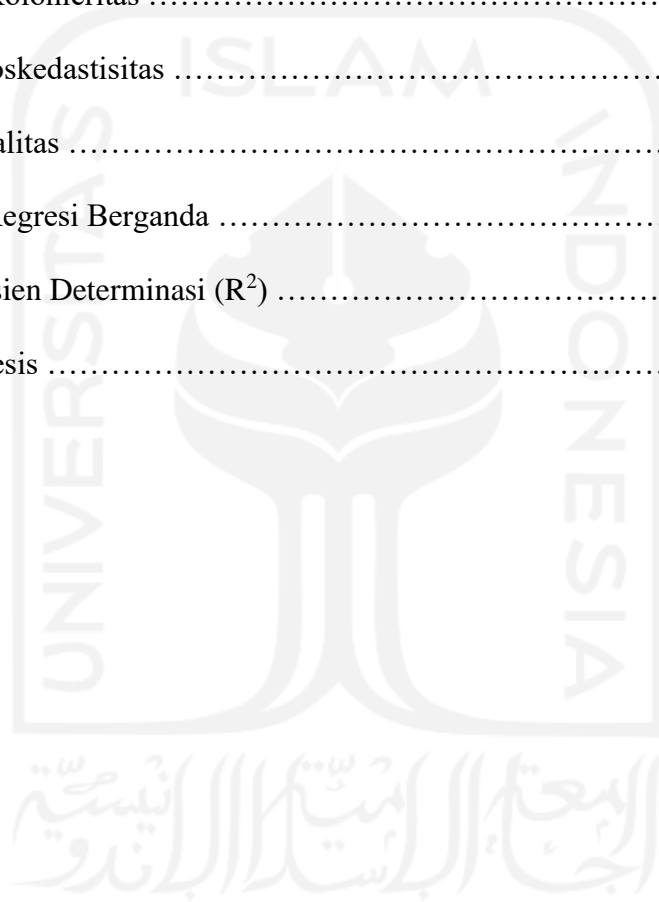
Halaman Sampul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 LANDASAN TEORI.....	10
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	10
2.1.2 Teori <i>Signalling</i>	11
2.1.3 Pengungkapan Laporan Keuangan	12
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia	14
2.1.5 Ukuran Legislatif	16
2.1.6 Tingkat Penyimpangan	17
2.1.7 Tingkat Ketergantungan	17

2.2 PENELITIAN TERDAHULU.....	18
2.3 KERANGKA PENELITIAN.....	22
2.4 HIPOTESIS PENELITIAN	23
2.4.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia	23
2.4.2 Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia	24
2.4.3 Pengaruh Tingkat Penyimpangan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia	25
2.4.4 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 POPULASI DAN SAMPEL.....	28
3.1.1 Populasi.....	28
3.1.2 Sampel	28
3.2 METODE PENGUMPULAN DATA	29
3.2.1 Sumber Data	29
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	29
3.3 VARIABEL PENELITIAN.....	30
3.3.1 Variabel Dependen	30
3.3.2 Variabel Independen.....	31
3.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	31
3.3.2.2 Ukuran Legislatif	32
3.3.2.3 Tingkat Penyimpangan	32
3.3.2.4 Tingkat Ketergantungan.....	33
3.4 METODE ANALISIS DATA	33
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	33
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	33
3.4.2.1 Uji Autokorelasi.....	34
3.4.2.2 Uji Multikolinieritas.....	34
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	34
3.4.2.4 Uji Normalitas.....	35

3.4.3 Analisis Regresi Berganda.....	35
3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	36
3.4.5 Uji Hipotesis	36
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN	37
4.1 DESKRIPSI OBYEK	37
4.2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF	38
4.3 UJI ASUMSI KLASIK.....	40
4.3.1 Uji Autokorelasi.....	40
4.3.2 Uji Multikolonieritas	40
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	41
4.3.4 Uji Normalitas	43
4.4 ANALISIS REGRESI BERGANDA	44
4.5 UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)	46
4.6 UJI HIPOTESIS.....	47
4.6.1 Indeks Pembangunan Manusia	48
4.6.2 Ukuran Legislatif	49
4.6.3 Tingkat Penyimpangan	50
4.6.4 Tingkat Ketergantungan	51
BAB V PENUTUP.....	53
5.1 KESIMPULAN	53
5.2 IMPLIKASI.....	54
5.3 KETERBATASAN & SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

1.1 Opini LKPD Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2018	3
4.1 Deskripsi Obyek	37
4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	38
4.3 Hasil Uji Autokorelasi	40
4.4 Hasil Uji Multikolonieritas	41
4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	42
4.6 Hasil Uji Normalitas	43
4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda	45
4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	46
4.9 Hasil Uji Hipotesis	47



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	23
4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	42
4.2 Hasil Normalitas Q-Q Plot	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Indeks Pembangunan Manusia

Lampiran 2: Ukuran Legislatif

Lampiran 3: Tingkat Penyimpangan

Lampiran 4: Tingkat Ketergantungan

Lampiran 5: Item Pengungkapan

Lampiran 6: Skor Item Pengungkapan

Lampiran 7: Hasil Uji Statistik SPSS



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the human development index, legislative size, level of deviation, and level of dependence on the level of disclosure of provincial government financial statements in Indonesia during 2016-2018. Government Regulation No. 71/2010 explains that users of financial reports are the public; people's representatives; supervisory agency; as well as the government. Based on these regulations, the researcher used the human development index variable to represent society, the legislative size variable to represent the people's representatives, the deviation rate variable to represent the supervisory agency, and the dependency level variable to represent the government. The results showed that the human development index (HDI) variable in a province was very influential on the performance of the provincial government. It is undeniable that human quality is very influential and tends to encourage the provincial government to do better work, especially in disclosing financial statements.

Keywords: *human development index, legislative measure, degree of deviation, level of dependence*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pengaruh indeks pembangunan manusia, ukuran legislatif, tingkat penyimpangan, dan tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2016-2018. Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa pengguna laporan keuangan yaitu masyarakat; para wakil rakyat; lembaga pengawas; serta pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, peneliti menggunakan variabel indeks pembangunan manusia untuk mewakili masyarakat, variabel ukuran legislatif untuk mewakili para wakil rakyat, variabel tingkat penyimpangan untuk mewakili lembaga pengawas, dan variabel tingkat ketergantungan untuk mewakili pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (IPM) pada suatu provinsi sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi tersebut. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa kualitas manusia sangat berpengaruh dan cenderung mendorong pemerintah provinsi untuk bekerja lebih baik lagi khususnya dalam pengungkapan laporan keuangan.

Kata kunci: indeks pembangunan manusia, ukuran legislatif, tingkat penyimpangan, tingkat ketergantungan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan kebijakan otonomi daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, di mana pemerintah daerah mempunyai kewenangan sendiri untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai undang-undang yang berlaku tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dan dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, kebijakan otonomi daerah tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga diperbarui melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tidak cukup sampai di situ, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adanya kebijakan otonomi daerah ini juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadikan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) wajib melaporkan pertanggungjawabannya salah satunya dalam bentuk laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan juga harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna baik pada halaman muka maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Ada 2 macam pengungkapan pada laporan keuangan yaitu pengungkapan wajib (*mandatory*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary*). Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang harus dilakukan oleh suatu entitas karena ketentuan, sedangkan

pengungkapan sukarela adalah pengungkapan tambahan yang bukan keharusan yang dilakukan oleh entitas karena keinginan untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat. Laporan keuangan yang telah diaudit dan telah diberikan pengungkapan dari hasil audit BPK dapat menjadi informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK akan memberikan hasil berupa opini. Terdapat empat macam opini yang diberikan oleh pemeriksa BPK, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Tabel 1.1

Opini LKPD Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2018

Tahun	WTP		WDP		TW		TMP		Total	
2016	31	91%	3	9%	0	0%	0	0%	34	100%
2017	33	97%	1	3%	0	0%	0	0%	34	100%
2018	32	94%	2	6%	0	0%	0	0%	34	100%

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) BPK RI

Keterangan =

WTP = Wajar Tanpa Pengecualian

WDP = Wajar Dengan Pengecualian

TW = Tidak Wajar

TMP = Tidak Menyatakan Pendapat

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) cenderung tetap walaupun terlihat ada naik turunnya jumlah opini WTP. Tidak berbeda pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terlihat cenderung tidak mengalami perubahan, banyak sedikit Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang mendapatkan opini WDP.

Adanya pemerintah provinsi yang mendapatkan opini WDP tetap harus menjadi perhatian karena pemerintahan provinsi menyangkut kehidupan orang banyak, maka sedikit apapun permasalahan pasti akan menimbulkan dampak yang cukup terasa. Melihat permasalahan tersebut, tentunya transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengungkapan laporan keuangan. Transparansi yang baik dalam pengungkapan laporan keuangan diperlukan untuk membuat banyak pihak semakin memahami laporan keuangan pemerintah. Semakin banyak pihak yang memahami, maka akan semakin banyak yang mengawasi sehingga nantinya dapat mengurangi kecurangan yang terjadi.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bentuk dari pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah. Kebijakan yang tepat diharapkan dapat memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Selain dari pihak pemerintahan, pihak luar seperti masyarakat umum juga berpengaruh terhadap adanya laporan keuangan yang berkualitas. Majunya akan kualitas hidup masyarakat diperlukan untuk menjamin bahwa masyarakat memahami akan pentingnya pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian yang sudah dilakukan mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi masih tergolong sedikit, karena

banyaknya penelitian yang mengambil Kota/Kabupaten sebagai objeknya. Dalam penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa hasil dari rata-rata tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi belum bisa dikatakan memuaskan. Beberapa penelitian terdahulu antara lain Hendriyani & Tahar (2015) dengan rata-rata pengungkapan sebesar 41,76%; Agnecia et al. (2015) sebesar 38,32%; Hilmi & Martani (2011) sebesar 44,56%; Qoyimah (2016) sebesar 64%; dan Rahmayanti (2018) sebesar 58,35%. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut bisa dikatakan bahwa rata-rata pengungkapannya cukup fluktuatif, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian ini dengan harapan penelitian ini bisa memberikan cerminan informasi mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

Masyarakat sendiri merupakan pihak yang jumlahnya paling banyak dalam penggunaan laporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas masyarakat sangat menentukan bagi bagus tidaknya kinerja pemerintah. Dalam hal kualitas masyarakat, Badan Pusat Statistik menyediakan data Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), ada tiga dimensi yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Qoyimah (2016) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi dengan Provinsi Papua Barat tahun 2012 memiliki IPM paling rendah yaitu 55,55% sedangkan IPM paling tinggi sebesar 78,39% diperoleh Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 dan nilai rata-rata sebesar 67,40.

Ukuran Legislatif, dimana hal ini adalah DPRD yang memiliki fungsi pengawasan, terutama dalam hal pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya fungsi pengawasan tersebut diharapkan dengan semakin banyaknya anggota DPRD akan semakin meningkatkan pengawasan yang berujung pada peningkatan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat. Namun, Agnecia et al. (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dimana semakin banyak jumlah legislatif maka proses kooperasi dan koordinasi akan semakin rumit. Kondisi tersebut akan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengontrol kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Menurut Priharjanto & Wardani (2017), tingkat penyimpangan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi dimana tingkat penyimpangan yang besar tidak serta merta mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan Hilmi & Martani (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat penyimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi dimana semakin besar tingkat penyimpangan yang ditemukan oleh BPK maka tingkat pengungkapan yang dilakukan semakin besar.

Tingkat Ketergantungan menunjukkan seberapa bergantungnya pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat. Penelitian Hendriyani & Tahar (2015) mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah provinsi tidak memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangannya. Hal senada juga diungkapkan oleh Hilmi & Martani (2011) dimana tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran tingkat ketergantungan tidak memberikan pengaruh bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah provinsi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pemilihan variabel independennya. Peneliti melihat bahwa pada penelitian terdahulu belum sesuai dengan Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 (2010), dimana pengguna laporan keuangan pemerintah provinsi antara lain masyarakat; para wakil rakyat; lembaga pengawas; serta pemerintah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmayanti (2018) menggunakan variabel independen Ukuran Pemerintah; Kekayaan Daerah; Jumlah SKPD; Umur Pemerintah Provinsi; dan Temuan Audit, dimana masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan pemerintah provinsi tidak masuk dalam variabel independennya. Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Hendriyani & Tahar (2015) menggunakan variabel independen Tingkat Ketergantungan; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Modal; Jumlah Penduduk; dan Temuan Audit, dimana wakil rakyat sebagai pengguna laporan keuangan pemerintah provinsi tidak masuk dalam variabel independennya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan variabel independen yang berhubungan dengan semua pengguna laporan keuangan pemerintah provinsi. Dari pihak masyarakat, peneliti menggunakan Indeks Pembangunan Manusia

untuk dijadikan variabel independen. Dari pihak wakil rakyat, peneliti menggunakan Ukuran Legislatif untuk dijadikan variabel independen. Dari pihak lembaga pengawas, peneliti menggunakan Tingkat Penyimpangan untuk dijadikan variabel independen. Dari pihak pemerintah, peneliti menggunakan Tingkat Ketergantungan untuk dijadikan variabel independen.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada dan melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Ukuran Legislatif, Tingkat Penyimpangan dan Tingkat Ketergantungan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?
2. Apakah ukuran legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?
3. Apakah tingkat penyimpangan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?
4. Apakah tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pengaruh indeks pembangunan manusia, ukuran legislatif, tingkat

penyimpangan dan tingkat ketergantungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat positif antara lain bagi:

1. Pemerintah pusat, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk tolok ukur dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Pemerintah Provinsi, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan demi terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas.
3. Akademisi, hasil penelitian ini bisa dijadikan informasi tambahan mengenai laporan keuangan, khususnya pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.
4. Praktisi, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam penyusunan laporan keuangan dan sebagai literatur pendukung untuk penelitian selanjutnya sehingga tercipta penelitian yang lebih baik.
5. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menurut Davis et al. (1997) adalah teori dimana seorang *steward* yang perilakunya diatur sedemikian rupa sehingga lebih mementingkan kepentingan organisasinya dibandingkan kepentingan pribadinya. Bahkan ketika pemimpin organisasinya tidak lagi selaras dengan manajemen, seorang *steward* lebih memilih untuk bertindak kooperatif daripada harus melakukan pembelotan. Tindakan pembelotan tidak dilakukan karena *steward* percaya akan manfaat yang diperoleh jika tetap bertindak kooperatif dalam bekerja.

Teori *stewardship* merupakan teori alternatif yang muncul dari keberadaan teori agensi yang telah terlebih dahulu hadir dalam hubungan prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Sifat dasar manusia yang dapat dipercaya menjadi dasar terciptanya teori *stewardship*, dimana diharapkan manajemen yang menjadi pengelola organisasi mendahulukan kepentingan organisasi dari kepentingan pribadinya. Dan memiliki asumsi bahwa bila kepentingan organisasi tercapai maka kepentingan pribadipun dapat terpenuhi (Jefri, 2018).

Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah (*principal*), selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Marliani et al., 2018).

Jefri (2018) mengasumsikan bahwa teori ini memandang para penerima amanah (*steward*) sebagai tulang punggung dari keberhasilan suatu organisasi dimana keberhasilan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dari organisasi itu sendiri. Teori ini menemukan bahwa bila keberhasilan suatu organisasi dapat tercapai dengan kinerja yang efektif dan efisien maka akan memberikan kepuasan dari pihak pemberi amanah (*principal*) maupun pihak penerima amanah (*steward*).

Dalam penelitian ini, pemerintah provinsi merupakan pihak penerima amanah (*steward*) dan rakyat merupakan pihak pemberi amanah (*principal*). Pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk memberikan kinerja terbaiknya kepada rakyat yang telah mempercayakan tata kelola pemerintahan kepadanya. Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi demi terwujudnya kesejahteraan sosial dan meningkatnya kepuasan rakyat terhadap pemerintah provinsi.

2.1.2 Teori *Signalling*

Teori *signalling* menurut Ross (1977) adalah dimana suatu entitas perusahaan akan terdorong menyampaikan informasi yang baik kepada calon investor agar harga saham entitas perusahaan tersebut meningkat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan bagus apabila organisasi tersebut memiliki informasi yang bagus tentang kinerjanya di masa lalu serta memiliki rencana yang bagus pula untuk kinerja di masa depan.

Dalam pandangan teori *signalling*, entitas yang berkualitas akan memberikan sinyal kepada pengguna laporan dengan memberikan pengungkapan/pemberian informasi yang lengkap. Pengungkapan dalam laporan keuangan pada dasarnya merupakan bentuk penyampaian informasi dari suatu entitas kepada pengguna laporan keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin banyak pengungkapan yang dilakukan oleh entitas

maka semakin menunjukkan bahwa entitas tersebut semakin berkualitas (Priharjanto & Wardani, 2017).

Menurut Hendriyani & Tahar (2015) teori *signalling* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan signal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol, pengungkapan yang lebih lengkap, serta penjelasan lebih detail dalam pengungkapan. Pemerintah dapat juga mengemas informasi prestasi dan kinerja keuangan dengan lebih lengkap untuk menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahannya dapat berjalan dengan baik. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat, baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

2.1.3 Pengungkapan Laporan Keuangan

Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 menjelaskan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan. Berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Laporan keuangan sendiri terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan yang disajikan juga harus sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan; andal; dapat dibandingkan; dan dapat dipahami. Hal tersebut diperlukan agar laporan keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa harus ada setidaknya 34 item pengungkapan yang mencakup antara lain Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan & Entitas Akuntansi; Kebijakan Fiskal/Keuangan & Ekonomi Makro; serta Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

Swardjono (2006) menjelaskan bahwa pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Pengungkapan sering dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk laporan keuangan formal. Pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan tetapi meliputi penyampaian informasi kualitatif.

Pengungkapan laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas dan cukup mengenai hasil aktivitas dari suatu unit organisasi, untuk dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit organisasi tersebut. Tiga konsep pengungkapan yang umum diusulkan adalah pengungkapan yang cukup, wajar, dan lengkap (Ghozali & Cahiri, 2007). Pengungkapan yang cukup merupakan konsep pengungkapan yang umum digunakan dari ketiga konsep tersebut. Konsep pengungkapan yang

cukup ini diharapkan dapat memenuhi pengungkapan minimal yang harus dilakukan suatu unit organisasi agar laporan keuangan yang disajikan tidak cenderung menyesatkan.

Pengelompokan pengungkapan dalam laporan keuangan terdapat dua bagian, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*Voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan lengkap yang menyajikan informasi-informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan tambahan yang tidak diwajibkan oleh standar akuntansi dan dianggap relevan dan berguna bagi pemakai laporan keuangan (Rahmayanti, 2018). Teori signalling mendasari pengungkapan sukarela yang dilakukan suatu unit organisasi dimana laporan yang disajikan diharapkan mendapat respon positif dari penggunanya. Menurut FASB pengungkapan wajib meliputi lingkup (1) sampai (3). Lingkup (1) laporan keuangan, (2) catatan atas laporan keuangan, dan (3) informasi pelengkap. Diluar pengungkapan wajib, lingkup (4) sarana pelaporan keuangan lain, dan lingkup (5) informasi lain (Suwardjono, 2006).

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan sarana bagi penduduk dalam mengakses hasil pembangunan dalam hal memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Tiga dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia adalah umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia bermanfaat sebagai data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Penggunaan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang baru dilakukan sejak tahun 2014 dan penghitungan untuk tahun 2010 dan seterusnya. Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang baru yaitu indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita juga diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, metode penghitungan agregasi juga dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Penggunaan indikator yang lebih tepat ini diharapkan dapat memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, serta dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Di sisi lain, PNB yang menggantikan PDB juga diharapkan lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah (Badan Pusat Statistik, 2019a).

Menurut Badan Pusat Statistik, penghitungan Indeks komponen adalah sebagai berikut:

a) Dimensi Kesehatan

$$I \text{ Kesehatan} = \frac{AHH - AHHmin}{AHHmaks - AHHmin}$$

Keterangan:

I : indeks komponen

AHH : angka harapan hidup

AHHmin : angka harapan hidup terendah

AHHmaks : angka harapan hidup tertinggi

b) Dimensi Pendidikan

$$I \text{ HLS} = \frac{HLS - HLSmin}{HLSmaks - HLSmin}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

I : indeks komponen

HLS : harapan lama sekolah

HLS_{min} : harapan lama sekolah terendah

HLS_{maks} : harapan lama sekolah tertinggi

RLS : rata-rata lama sekolah

RLS_{min} : rata-rata lama sekolah terendah

RLS_{maks} : rata-rata lama sekolah tertinggi

c) Dimensi Pengeluaran

$$I_{Pengeluaran} = \frac{In(pengeluaran) - In(pengeluaran_{min})}{In(pengeluaran_{maks}) - In(pengeluaran_{min})}$$

Keterangan:

I : indeks komponen

In : indeks komponen

Pengeluaran_{min} : pengeluaran terendah

Pengeluaran_{maks} : pengeluaran tertinggi

Sedangkan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$$

Keterangan:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

I : indeks komponen

2.1.5 Ukuran Legislatif

Dalam pemerintahan Indonesia, yang berperan sebagai badan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan Pemerintah Daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

DPRD yang mempunyai peran vital dalam pengawasan keuangan daerah, jumlah anggotanya dapat berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib. Oleh sebab itu, semakin banyak jumlah anggota DPRD diharapkan semakin dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga terdapat peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan (Yulianingtyas, 2010).

2.1.6 Tingkat Penyimpangan

Tingkat penyimpangan adalah perbandingan antara nominal temuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan total belanja daerah. Nominal temuan menggunakan jumlah nominal kasus-kasus yang berdampak kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Priharjanto & Wardani, 2017).

Tingkat pengungkapan laporan keuangan akan berkurang jika tingkat penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena aparat pemerintah berusaha menutupi penyimpangan yang mereka lakukan sehingga mengurangi pengungkapan yang dilakukan (Hilmi & Martani, 2016)

2.1.7 Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan menunjukkan seberapa besar jumlah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan

operasionalnya. Adanya ketergantungan daerah yang besar terhadap pemerintah pusat kemungkinan membuat pemerintah pusat membatasi penggunaan dana oleh pemerintah daerah dan meminta pengungkapan yang lebih untuk memonitor penggunaan dana tersebut. Hal ini berarti semakin besar tingkat ketergantungan maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Hilmi & Martani, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tergolong relatif sedikit jika dibandingkan dengan penelitian mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian guna memperbanyak referensi tentang tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Penulis juga menggunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Priharjanto & Wardani (2017) dengan judul Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia menjelaskan bahwa dari 8 (delapan) faktor yang diteliti hanya 2 (dua) yang berpengaruh secara signifikan yaitu opini audit dan jumlah penduduk. Opini audit serta jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin bagus opini audit yang diperoleh, semakin baik pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh entitas tersebut. Hal ini sejalan dengan teori sinyal bahwa semakin banyak pengungkapan yang dilakukan menunjukkan semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang disusun yang berarti semakin tinggi juga opini yang diperoleh. Jumlah penduduk juga merupakan faktor yang signifikan memengaruhi pengungkapan, hal ini sejalan dengan dugaan bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu daerah maka semakin kompleks

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan yang lebih banyak dan baik.

Penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia yang dilakukan Hendriyani & Tahar (2015) mengungkapkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima daerah tidak memengaruhi tingkat pengungkapan, karena insentif pelaporan keuangan untuk mendapatkan opini wajar, bukan dalam hal kualitas pengungkapan. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kekayaan suatu daerah tidak akan secara otomatis melakukan pengungkapan informasi yang tinggi pula. Belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi belanja yang dikeluarkan maka semakin banyak pula bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga menimbulkan dorongan pengungkapan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah sebagai wujud pengabdian. Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk merupakan proksi dari tingkat kompleksitas pemerintah. Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin kompleks pemerintahan tersebut sehingga semakin tinggi tingkat pengungkapannya. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal ini disebabkan karena BPK akan memberikan saran kepada pemerintah provinsi untuk memperbaiki temuan-temuan audit yang mereka temukan, dengan adanya perbaikan maka opini yang diberikan akan mendapatkan opini wajar. Sehingga jumlah temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.

Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Agnecia et al. (2015) dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, diferensiasi fungsional tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan dan spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan, ukuran legislatif; kekayaan pemerintah daerah dan umur administratif tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Hilmi & Martani (2016) juga menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi memiliki kekayaan yang lebih besar yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Variabel tingkat ketergantungan dan total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Dalam kategori kompleksitas pemerintahan, jumlah penduduk berpengaruh positif. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar dalam laporan keuangan Pemda. Sedangkan jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Dalam kategori Hasil Pemeriksaan BPK, tingkat penyimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Semakin besar tingkat penyimpangan yang ditemukan oleh BPK maka semakin besar tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan BPK mendorong pemerintah provinsi untuk

mengungkapkan lebih besar berdasarkan hasil audit BPK tersebut. Sedangkan jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

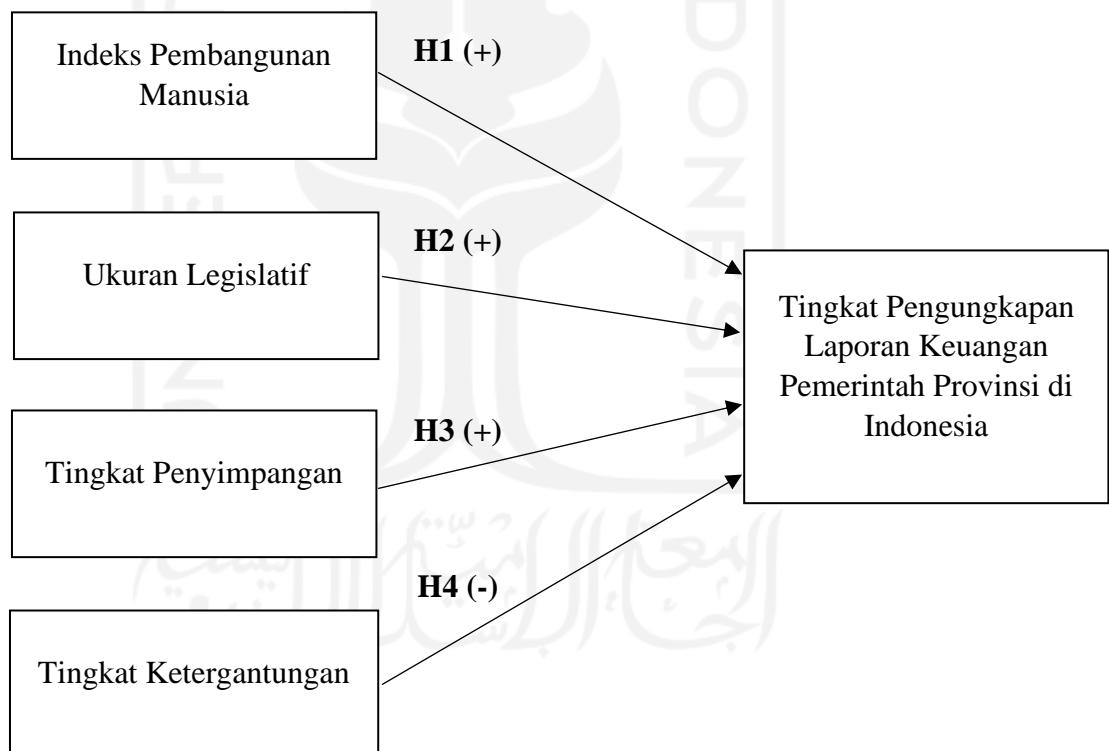
Menurut Rahmayanti (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia, ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran ukuran pemerintah yang digambarkan dengan nilai total asset yang dimiliki oleh setiap pemerintah tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi. Sedangkan kekayaan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran kekayaan daerah yang digambarkan dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki oleh setiap pemerintah dapat memiliki pengaruh terhadap besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi. Di sisi lain, jumlah SKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran jumlah SKPD yang dimiliki oleh setiap pemerintah tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi, dikarenakan setiap SKPD akan memiliki kegiatan yang sama. Umur pemerintah provinsi juga tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran umur pemerintah provinsi yang dinilai berdasarkan undang-undang pembentukan pemerintahan yang dimiliki oleh setiap pemerintah tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi. Selain itu temuan audit juga tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran temuan audit yang ditemukan oleh BPK tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan laporan keuangan pada setiap pemerintah provinsi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Qoyimah (2016) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia, indeks pembangunan manusia ternyata memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat dengan pendidikan yang tinggi dan sejahtera akan lebih sadar akan informasi, hak, dan kewajiban dari pemerintah sehingga masyarakat akan lebih sadar untuk mengawasi kinerja pemerintah. Tuntutan masyarakat terhadap transparansi yang naik ditindaklanjuti dengan pengungkapan yang lebih sehingga tingkat pengungkapan naik. Kewajiban tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Laporan keuangan dimungkinkan tidak berfokus pada pengungkapan kewajiban secara khusus namun kinerja secara keseluruhan sehingga kewajiban disajikan secara normal tanpa memperhatikan besaran kewajiban. Pengungkapan secara detail sesuai kebutuhan pihak lain seperti kreditur mungkin mengakibatkan biaya pengungkapan menjadi besar sehingga pemerintah berusaha menggunakan cara lain untuk meyakinkan kreditur dalam menyetujui pinjaman. Dana alokasi umum terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan. Dana alokasi umum yang tinggi memungkinkan pemerintah terdorong untuk mengungkapkan lebih dengan tujuan menjaga kepercayaan pemerintah pusat. Dana alokasi umum yang tinggi juga mengakibatkan semakin banyak pula penggunaannya yang kemudian pengungkapan laporan keuangan akan semakin tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang merupakan sumber PAD sehingga PAD masih belum bisa dipastikan jumlahnya setiap tahun dan selalu berubah. Pendapatan Asli Daerah yang terus berubah tidak terlalu memotivasi pemerintah dalam melakukan pengungkapan.

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan indeks pembangunan manusia, ukuran legislatif, tingkat penyimpangan dan tingkat ketergantungan sebagai variabel independen dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia sebagai variabel dependen. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu model terintegrasi mengenai pola hubungan antar variabel yang akan diteliti berdasarkan pada kerangka proses berpikir. Berikut gambaran kerangka konseptual penelitian:

Gambar 2.1



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia

Transparan dan akuntabel merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengguna dari laporan keuangan tersebut. Kualitas hidup masyarakat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat atas pentingnya laporan keuangan. Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai tolok ukur untuk tinggi rendahnya kualitas hidup masyarakat. Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia maka semakin tinggi juga kesadaran masyarakat atas tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Qoyimah (2016) menyebutkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal ini dimungkinkan karena masyarakat dengan pendidikan yang tinggi dan sejahtera akan lebih sadar terhadap informasi, hak, dan kewajiban dari pemerintah sehingga masyarakat akan lebih sadar untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Hal senada juga dijelaskan oleh Setyowati (2016), penelitiannya menunjukkan bahwa tingginya pembangunan masyarakat pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi pembangunan masyarakat, maka semakin beragam keinginan masyarakat yang ingin terpenuhi, yang akhirnya akan menimbulkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah sehingga pemerintah harus memberikan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih rinci.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₁ = Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

2.4.2 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia

Peranan DPRD sebagai pengawas keuangan berjalan dengan baik sehingga dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Semakin besar jumlah anggota legislatif maka diharapkan akan semakin besar tingkat pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar (Rahayu & Mardiana, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum & Syafitri (2012), semakin banyak jumlah anggota DPRD akan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tingkat pengungkapan LKPD. Adanya pengaruh positif yang signifikan antara ukuran legislatif dan tingkat pengungkapan LKPD disebabkan karena DPRD sebagai wakil masyarakat memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan informasi keuangan Pemerintah Daerah agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, semakin banyak jumlah anggota DPRD akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengungkapan secara lengkap.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Marliani et al. (2018), lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis dalam pengawasan keuangan daerah. Semakin besar jumlah anggota legislatif maka diharapkan akan semakin besar tingkat pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif.

Menurut penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

2.4.3 Pengaruh Tingkat Penyimpangan terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia

Tingkat penyimpangan menjadi salah satu faktor dalam pengungkapan laporan keuangan. Penyimpangan yang terjadi bisa sebagai kecurangan di dalam internal organisasi atau kecurangan dalam hal nominal uang. Kecurangan yang dilakukan menjadi alasan bagi oknum aparat pemerintahan untuk menghindari kecurigaan dari BPK. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi banyak pihak khususnya masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang bersih.

Menurut Hilmi & Martani (2016), tingkat penyimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Karena semakin besar tingkat penyimpangan yang ditemukan oleh BPK maka tingkat pengungkapan yang dilakukan semakin besar. Hasil ini menolak asumsi bahwa aparat pemerintah berusaha menutupi penyimpangan yang mereka lakukan sehingga mengurangi pengungkapan yang dilakukan. Hal ini dapat dikarenakan BPK mendorong pemerintah provinsi untuk mengungkapkan lebih besar berdasarkan hasil audit BPK tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H₃ = Tingkat Penyimpangan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

2.4.4 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia

Dana transfer adalah pendanaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagai bentuk pengawasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka pemerintah pusat berhak memonitoring kinerja pemerintah daerah atas dana yang telah diberikan. Sehingga semakin banyak dana yang disalurkan pemerintah pusat kepada daerah menggambarkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Dan juga semakin meningkat tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat maka tuntutan

untuk menyajikan pengungkapan juga akan meningkat. Untuk mengurangi asimetri yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat perlu adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diberikan pemerintah pusat, serta memberi keyakinan kepada pemerintah pusat bahwa dana yang disalurkan ke pemerintah daerah tidak disalahgunakan (Putri & Arza, 2019).

Menurut Hilmi & Martani (2016), tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Besaran tingkat ketergantungan tidak memberikan pengaruh bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah provinsi. Hasil penelitian tersebut juga sepaham dengan Priharjanto & Wardani (2017) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄ = Tingkat Ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel

3.1.1 Populasi

Menurut Arifin (2017), populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau suatu yang dapat diperoleh dan dapat memberikan informasi yang berupa data untuk membantu dalam penelitian. Dengan kata lain, populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia selama 2016 sampai 2018. Laporan keuangan yang digunakan merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3.1.2 Sampel

Sampel penelitian menurut Arifin (2017) adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2016-2018, karena didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang digunakan dapat menyajikan informasi yang terbaru sehingga bisa memberikan gambaran mengenai kondisi pemerintah provinsi saat ini.

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti sehingga sampel hanya representatif untuk populasi yang diteliti (Arifin, 2017). Pertimbangan yang dimaksud dapat berupa kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pertimbangan atau kriteria yang akan digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini antara lain:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2016-2018 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Mendapat opini wajar tanpa pengecualian dan wajar dengan pengecualian dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi memiliki data variabel-variabel dalam penelitian ini secara lengkap.
- d. Menyediakan data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016-2018 untuk setiap provinsi secara lengkap.
- e. Menyediakan data jumlah anggota DPRD tahun 2016-2018 untuk setiap provinsi secara lengkap.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data atau publikasi lainnya (Siyoto & Sodik, 2015). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui website Badan Pemeriksa Keuangan di www.bpk.go.id.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data untuk penelitian ini antara lain:

- a. Mengunduh data dari website Badan Pemeriksa Keuangan, website Badan Pusat Statistik, dan website DPRD tiap provinsi di Indonesia.
- b. Menggunakan teknik dokumentasi yang dipelajari dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, serta artikel yang dibahas guna dijadikan sebagai referensi dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian.

3.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari satu variabel terikat (dependen) dan empat variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini antara lain indeks pembangunan manusia, ukuran legislatif, tingkat penyimpangan dan tingkat ketergantungan.

3.3.1 Variabel Dependen

Menurut Siyoto & Sodik (2015), variabel dependen atau variable terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena terdapat variabel bebas atau independent. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dimaksud adalah berupa perbandingan antara pengungkapan yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dengan pengungkapan yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Menurut Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010, tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah. Hasil dari perbandingan ini akan memberikan gambaran tentang besarnya tingkat pengungkapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dibandingkan dengan pengungkapan wajib yang seharusnya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Metode yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah indeks scoring.

Indeks scoring sendiri adalah pemberian skor pada pada daftar *checklist* pengungkapan wajib. Daftar *checklist* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 34 item pengungkapan yang seharusnya ada dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, 34 item pengungkapan tersebut mencakup antara lain Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan & Entitas Akuntansi; Kebijakan Fiskal/Keuangan & Ekonomi Makro; serta Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan. Berikut rumus yang digunakan untuk mengukur Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia:

$$DISC = \frac{\text{Pengungkapan dalam LKPP}}{\text{Pengungkapan dalam PSAP}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab pada perubahan atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia, Ukuran Legislatif, Tingkat Penyimpangan, dan Tingkat Ketergantungan.

3.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan sarana bagi penduduk dalam mengakses hasil pembangunan dalam hal memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (Badan Pusat Statistik, 2019). Data Indeks Pembangunan Manusia untuk setiap provinsi di Indonesia diperoleh dengan mengunduh dari website Badan Pusat Statistik di www.bps.go.id. Untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia dapat dinyatakan dengan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

3.3.2.2 Ukuran Legislatif

Jumlah anggota DPRD dalam suatu pemerintahan provinsi memiliki peran yang vital bagi terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi DPRD sebagai pengawas keuangan pemerintah daerah. Demi terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, tidak menutup kemungkinan bahwa semakin banyak anggota DPRD maka semakin baik pula dampaknya bagi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Data jumlah anggota DPRD tiap provinsi didapatkan dari website resmi DPRD masing-masing provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini, Ukuran Legislatif dapat dinyatakan dengan:

ULEG = Ukuran Legislatif

3.3.2.3 Tingkat Penyimpangan

Tingkat penyimpangan yang dilakukan suatu organisasi sedikit banyak akan merugikan bagi para stakeholder. Hal tersebut juga bisa berdampak pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Lemahnya pengendalian internal menjadi salah satu sebab adanya penyimpangan yang terjadi. Data yang digunakan untuk tingkat penyimpangan diperoleh Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK. Tingkat penyimpangan didapatkan dengan membandingkan antara nominal penyimpangan dengan total belanja, sehingga dapat diukur dengan:

$$DEV = \frac{\text{Nominal Penyimpangan}}{\text{Total Belanja}}$$

3.3.2.4 Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan dihitung dari pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibagi dengan total pendapatan. Pendapatan transfer merupakan jenis pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan operasional, sedangkan total pendapatan diperoleh dari PAD ditambah pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah (Priharjanto & Wardani, 2017). Tingkat Ketergantungan dapat diukur dengan:

$$DEPEND = \frac{\text{Dana Transfer}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sujarweni & Endrayanto (2013), statistik deskriptif adalah pengolahan data untuk tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Analisis ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel. Perhitungan pada statistik deskriptif terdiri dari *mean*, *median*, *variance*, *range*, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel (Rahmayanti, 2018).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

3.4.2.1 Uji Autokorelasi

Arifin (2017) menjelaskan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk melihat terjadinya korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi linier berganda dapat digunakan metode Durbin-Watson. Kriteria autokorelasi yang ada antara lain:

1. Jika nilai $d < -2$, maka ada autokorelasi positif.
2. Jika $-2 \leq d \leq 2$, maka tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai $d > 2$, maka ada autokorelasi negatif.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinieritas, maka model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar. Sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi. Salah satu cara mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan Uji Farrar-Glauber (perhitungan ratio-F untuk menguji lokasi multikolinieritas). Hasil dari F-statistik (F_i) dibandingkan F-tabel. Kriteria pengujiannya adalah apabila $F\text{-tabel} > F_i$, maka variabel bebas tersebut kolinear terhadap variabel lainnya. Sebaliknya, jika $F\text{-tabel} < F_i$, maka variabel bebas tersebut tidak kolinear terhadap variabel bebas yang lain (Arifin, 2017).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti terdapat varian yang tidak sama dalam kesalahan pengganggu. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menentukan heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot, titik yang terbentuk harus menyebar

secara acak, baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Arifin, 2017).

3.4.2.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu (residual) dalam model memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji F dan uji T mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan menerapkan statistik non-parametric Kolmogronov-Smirnov. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi berupa data residual normal yaitu ketika nilai sig yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, sedangkan data tidak residual normal yaitu ketika nilai sig yang dihasilkan kurang dari 0,05 (Rahmayanti, 2018).

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Ukuran Legislatif, Tingkat Penyimpangan, dan Tingkat Ketergantungan. Model regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini diproyeksikan sebagai berikut:

$$DISC_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 ULEG_{it} + \beta_3 DEV_{it} + \beta_4 DEPEND_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan =

- DISC = Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- ULEG = Ukuran Legislatif
- DEV = Tingkat Penyimpangan

➤ $DEPEND$ = Tingkat Ketergantungan

➤ α = Konstan

➤ β_1, \dots, β_4 = Koefisien Regresi

➤ ε = Error

3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol dan satu. Nilai R yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi suatu model, maka semakin besar pula kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Arifin, 2017).

3.4.5 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan secara parsial atau menggunakan uji statistik t. Uji statistik t adalah pengujian koefisien regresi secara parsial dengan menentukan formula statistik yang akan diuji. Uji statistik t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Metode statistik yang digunakan dengan significance level $\alpha = 5\%$ (0,05) yang berarti derajat kesalahan sebesar 5%. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel atau dengan melihat nilai signifikansi dari t-hitung. Jika nilai nilai signifikansi $t < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak. Dengan kata lain variabel independen secara parsial signifikan memengaruhi variabel dependen (Arifin, 2017).

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek

Dalam penelitian ini, obyek yang diteliti adalah laporan keuangan seluruh pemerintah provinsi di Indonesia selama tahun 2016 hingga tahun 2018. Jumlah keseluruhan laporan keuangan yang diteliti adalah sebanyak 102 laporan keuangan, terdiri dari 34 provinsi yang telah diaudit selama tahun 2016-2018. 102 laporan keuangan tersebut telah memenuhi kriteria untuk penelitian ini diantaranya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP), serta memiliki data variabel yang diperlukan. Penulis mendapatkan data laporan keuangan pemerintah provinsi dari Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 4.1

Tahun	Telah diaudit BPK	Opini dari BPK		Data Variabel	Data IPM	Data Jumlah Anggota DPRD
		WTP	WDP			
2016	34	31	3	34	34	34
2017	34	33	1	34	34	34
2018	34	32	2	34	34	34
Total	102	102		102	102	102

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran data sampel secara deskriptif. Statistik deskriptif yang dijelaskan meliputi antara lain mean, median, maximum, minimum, dan standar deviasi dari setiap variabel yang ada dalam penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	DISC	IPM	ULEG	DEV	DEPEND
N	102	102	102	102	102
Mean	0,801	69,766	63,880	0,016	0,624
Median	0,794	69,985	55,500	0,001	0,634
Std. Deviation	0,093	4,064	20,386	0,058	0,167
Variance	0,009	16,516	415,590	0,003	0,028
Range	0,412	22,420	71,000	0,364	0,666
Minimum	0,559	58,050	35,000	0,00002	0,284
Maximum	0,971	80,470	106,000	0,364	0,950

Sumber: Output Data SPSS, diolah 2020

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada tabel tersebut dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada variabel Tingkat Pengungkapan (DISC), nilai rata-rata skor pengungkapan pemerintah provinsi di Indonesia sebesar 0.801 (80,1%) dengan standar deviasi 0.093. Nilai tertinggi dalam pengungkapan item laporan keuangan diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2016 yaitu sebanyak 0.971 (97,1%), sedangkan nilai terendah dalam pengungkapan item laporan keuangan diperoleh oleh 2 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2017 dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2018 dengan item pengungkapan sebesar 0.559 (55.9%). Jauhnya skor yang diperoleh antara

nilai tertinggi dan terendah menunjukkan adanya kurang kesadaran atas pentingnya informasi yang harusnya diungkapkan pada laporan keuangan. Hal ini bisa menyebabkan kurang lengkapnya informasi yang bisa diperoleh oleh pengguna laporan keuangan.

2. Pada variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai rata-rata IPM pemerintah provinsi di Indonesia sebesar 69.766 dengan standar deviasi 4.064. Provinsi Papua Barat memperoleh nilai terendah dengan skor 58.05 pada tahun 2016, sedangkan Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai tertinggi dengan skor 80.47 pada tahun 2018.
3. Nilai rata-rata untuk variabel Ukuran Legislatif (ULEG) yaitu sebesar 63.880 dengan standar deviasi 20.386. Jumlah legislatif tertinggi pada periode tahun 2016-2018 terdapat pada Provinsi DKI Jakarta dengan total 106 anggota legislatif, sedangkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki jumlah terendah yaitu sebanyak 35 anggota legislatif.
4. Pada variabel Tingkat Penyimpangan (DEV), nilai rata-rata yang diperoleh pemerintah provinsi di Indonesia sebesar 0.016 (1,6%) dengan standar deviasi 0.058. Nilai tertinggi pada Tingkat Penyimpangan diperoleh Provinsi Kalimantan Barat periode anggaran 2016 sebesar 0.364 (36,4%). Provinsi Banten periode anggaran 2017 memperoleh nilai terendah pada variabel Tingkat Penyimpangan sebesar 0.00002 (0.002%).
5. Pada variabel Tingkat Ketergantungan (DEPEND), nilai rata-rata yang diperoleh pemerintah provinsi di Indonesia sebesar 0.624 (62,4%) dengan standar deviasi 0.167. Nilai terendah diperoleh Provinsi DKI Jakarta periode anggaran 2016 sebesar 0.284 (28,4%), sedangkan nilai tertinggi diperoleh Provinsi Papua Barat periode anggaran 2016 sebesar 0.950 (95%).

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Pada penelitian ini, metode pengujian yang digunakan untuk uji autokorelasi yaitu uji Durbin-Watson.

Tabel 4.3

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,368 ^a	0,135	0,100	0,0886336	1,811

Sumber: Output Data SPSS, diolah 2020

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1.811 dimana nilai tersebut lebih tinggi dari nilai d_U pada tabel Durbin-Watson untuk 4 variabel dengan 102 obyek penelitian yaitu sebesar 1.7596. Nilai Durbin-Watson yang diperoleh juga lebih rendah dari $4-d_U$ ($4-1.7596$) yaitu sebesar 2.2404, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi syarat uji asumsi klasik karena tidak terdapat autokorelasi.

4.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di dalam sebuah model regresi. Interkorelasi tersebut dapat dilihat

dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VIF dan Tolerance, nilai Eigenvalue dan Condition Index, serta nilai standar error koefisien beta atau koefisien regresi parsial.

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	0,049	0,266		0,182	0,856		
IPM	0,009	0,003	0,408	3,114	0,002	0,520	1,922
Ukuran_Legislatif	0,000	0,001	0,098	0,797	0,427	0,595	1,682
Tingkat_Ketergantungan	0,119	0,088	0,212	1,353	0,179	0,363	2,754
Tingkat_Penyimpangan	-0,222	0,156	-0,137	-1,426	0,157	0,963	1,038

Sumber: Output Data SPSS, diolah 2020

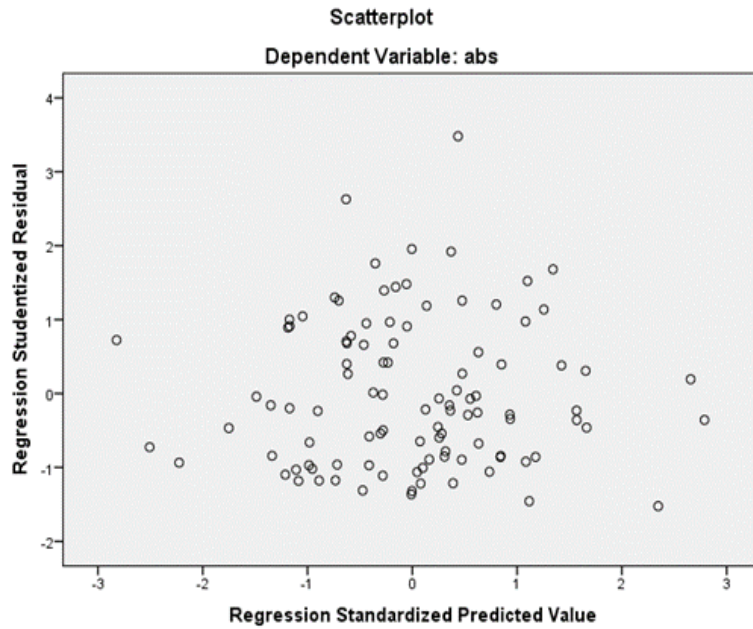
Berdasarkan hasil uji multikolonieritas diketahui bahwa nilai Tolerance yang diperoleh untuk 4 variabel yaitu lebih dari 0.10, sedangkan nilai VIF yang diperoleh untuk 4 variabel tidak lebih dari 10. Melihat hasil yang diperoleh dari nilai Tolerance dan nilai VIF maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas dan memenuhi syarat uji asumsi klasik.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain mengingat model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis pengujian yaitu grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dan residualnya yaitu SRESID serta uji Glejser untuk semakin memperkuat asumsi bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.1

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dapat dilihat pada grafik *Scatterplot* bahwa titik-titik yang ada tersebar secara merata tanpa membentuk pola tertentu baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan kondisi tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,034	0,153		-0,221	0,825
IPM	0,001	0,002	0,116	0,830	0,409
Ukuran_Legislatif	-6.104E-5	0,000	-0,025	-0,189	0,851
Tingkat_Ketergantungan	0,012	0,051	0,040	0,237	0,813
Tingkat_Penyimpangan	0,032	0,090	0,037	0,359	0,720

Sumber: Output Data SPSS, diolah 2020

Nilai Sig. yang dibutuhkan agar penelitian disebut tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu lebih dari 0.05. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai Sig. semua variabel lebih dari 0.05. Berdasarkan nilai yang diperoleh bisa disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau memenuhi syarat uji asumsi klasik.

4.3.4 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel pengganggu (residual) dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

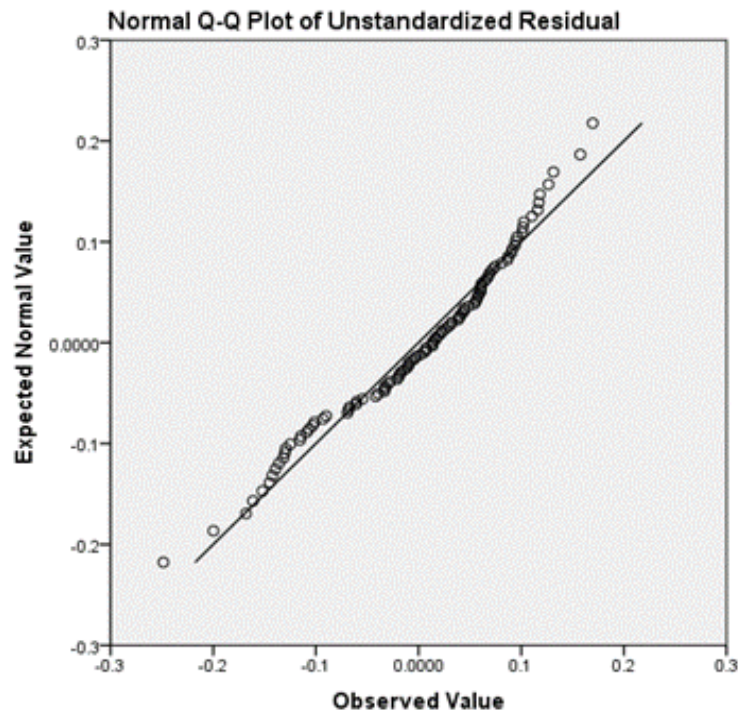
		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,08686076
Most Extreme Differences	Absolute	0,081
	Positive	0,065
	Negative	-0,081
Test Statistic		0,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,092 ^c

Sumber: Output Data SPSS, diolah 2020

Distribusi data normal dapat dikatakan apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) harus lebih dari 0.05. Dilihat pada tabel bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh sebesar 0.092, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual atau variabel pengganggu berdistribusi normal.

Gambar 4.2

Hasil Normalitas Q-Q Plot



Variabel pengganggu berdistribusi normal juga diperkuat dengan Q-Q Plot dimana dapat dilihat pada gambar 4.2 bahwa titik-titik residual menyebar pada sekitar garis diagonal. Kondisi tersebut semakin meyakinkan asumsi bahwa penelitian ini memenuhi syarat uji asumsi klasik.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi berganda ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7**Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	0,049	0,266		0,182	0,856		
IPM	0,009	0,003	0,408	3,114	0,002	0,520	1,922
Ukuran_Legislatif	0,000	0,001	0,098	0,797	0,427	0,595	1,682
Tingkat_Ketergantungan	0,119	0,088	0,212	1,353	0,179	0,363	2,754
Tingkat_Penyimpangan	-0,222	0,156	-0,137	-1,426	0,157	0,963	1,038

Sumber: Output Data SPSS, diolah 2020

Berdasarkan hasil analisis analisis regresi berganda di atas maka model regresi yang digunakan adalah:

$$DISC = 0.049 + 0.009 IPM + 0.000 ULEG + 0.119 DEPEND - 0.222 DEV$$

Melihat dari persamaan regresi di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 0.049 berarti apabila variabel independen dianggap 0 maka rata-rata nilai pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia yang diperoleh sebesar 0.049. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia masih rendah jika dengan kondisi tidak ada variabel IPM, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan, dan tingkat penyimpangan.
2. Koefisien regresi indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0.009 menunjukkan bahwa apabila variabel IPM naik satu satuan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia akan mengalami perubahan sebesar 0.009 dengan kondisi variabel lain tidak berubah.
3. Koefisien regresi ukuran legislatif (ULEG) sebesar 0.000 menyatakan apabila variabel ULEG naik satu satuan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan

pemerintah provinsi di Indonesia akan berubah sebesar 0.000 dengan kondisi variabel lain tidak ada yang berubah.

4. Koefisien regresi tingkat ketergantungan (DEPEND) sebesar 0.119 menyatakan bahwa jika variabel DEPEND naik satu satuan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia akan berubah sebesar 0.119 dengan kondisi variabel lain tidak berubah.
5. Koefisien regresi tingkat penyimpangan (DEV) sebesar -0.222 berarti apabila variabel DEV naik satu satuan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia akan mengalami perubahan sebesar -0.222 dengan kondisi variabel lain tidak ada yang berubah.

4.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk melihat kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan kisaran nilai antara nol dan satu. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,368 ^a	0,135	0,100	0,0886336

Sumber: Output Data SPSS, diolah 2020

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) dengan meregresikan indeks pembangunan manusia, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan, dan tingkat penyimpangan maka didapatkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.100. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan, dan tingkat

penyimpangan secara simultan berpengaruh terhadap variabel tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia sebesar 10%, sedangkan sisanya sebesar 90% dipengaruhi variabel-variabel lain di luar model.

4.6 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji statistik t untuk menguji hipotesis secara parsial. Metode statistik yang digunakan dengan *significance level* $\alpha = 0,05$ (5%) yang berarti derajat kesalahan 5%. Hasil uji statistik t dan hasilnya terhadap hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Hipotesis

H_x	Hipotesis	Sig.	Keterangan
H ₁	Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia	0,002	Didukung oleh data
H ₂	Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia	0,427	Tidak didukung oleh data
H ₃	Tingkat Penyimpangan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia	0,179	Tidak didukung oleh data
H ₄	Tingkat Ketergantungan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia	0,157	Didukung oleh data

4.6.1 Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dilihat nilai sig. variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperoleh sebesar 0.002, dengan *significance level* $\alpha = 0,05$ (5%) berarti IPM signifikan pada level 5% karena nilai sig 0.002 kurang dari 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia sehingga dapat dikatakan H_1 diterima. Hasil ini berarti apabila Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu provinsi mengalami peningkatan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pada provinsi tersebut juga akan mengalami peningkatan dan juga berlaku sebaliknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas masyarakat sangat berpengaruh terhadap aspek di sekitarnya. Semakin tinggi kualitas masyarakat maka akan mendorong pemerintahannya untuk semakin meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya. Masyarakat akan menuntut pemerintah untuk transparan dan akuntabel dalam pengungkapan laporan keuangan dikarenakan masyarakat sadar akan betapa pentingnya informasi dimana pada hal ini pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qoyimah (2016) dan Setyowati (2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Qoyimah (2016) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan dimana masyarakat dengan pendidikan yang tinggi dan sejahtera akan lebih sadar terhadap informasi, hak, dan kewajiban dari pemerintah sehingga masyarakat mempunyai inisiatif untuk mengawasi kinerja pemerintah. Lebih lanjut, tuntutan masyarakat akan transparansi ditindaklanjuti dengan pengungkapan yang lebih oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan tingkat pengungkapan laporan keuangan mengalami kenaikan.

Setyowati (2016) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa tingginya pembangunan masyarakat pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi pembangunan masyarakat, maka semakin beragam keinginan masyarakat yang ingin terpenuhi, yang akhirnya akan menimbulkan tuntutan masyarakat kepada pemerintah sehingga pemerintah harus memberikan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih rinci.

4.6.2 Ukuran Legislatif

Berdasarkan hasil uji hipotesis ditunjukkan nilai sig. variabel ukuran legislatif (ULEG) sebesar 0.427. Nilai tersebut berarti ukuran legislatif (ULEG) tidak signifikan pada level 5% karena nilai sig yang diperoleh sebesar 0.427 lebih besar dari 0.05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ukuran legislatif (ULEG) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak tidaknya jumlah anggota legislatif suatu pemerintah provinsi tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tersebut, akan tetapi lebih kepada bagaimana kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota legislatif itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan Agnecia et al. (2015) yang meneliti pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah anggota legislatif maka proses kooperasi dan koordinasi akan semakin rumit. Kondisi tersebut akan membuat pemerintah daerah kesulitan dalam mengontrol kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Di sisi lain, hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum & Syafitri (2012) serta penelitian yang dilakukan oleh Marliani et al. (2018). Dalam penelitiannya, Setyaningrum & Syafitri (2012) mengungkapkan bahwa

semakin banyak anggota legislatif maka akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan. Hal senada juga diungkapkan Marliani et al. (2018) bahwa dengan semakin banyak anggota legislatif maka diharapkan akan meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif.

4.6.3 Tingkat Penyimpangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel nilai sig. variabel Tingkat Penyimpangan (DEV) yang diperoleh sebesar 0.179, dengan *significance level* $\alpha = 0,05$ (5%) berarti tingkat penyimpangan tidak signifikan pada level 5% karena nilai sig 0.179 lebih besar dari 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan (DEV) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia sehingga dapat dikatakan H_3 ditolak. Sesuai dengan teori *signalling* di mana suatu pemerintah provinsi akan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan dengan memberikan pengungkapan informasi yang lengkap dengan tidak terpengaruh akan besar atau kecilnya tingkat penyimpangan yang terjadi pada provinsi tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priharjanto & Wardani (2017) yang meneliti pengaruh temuan, tingkat penyimpangan, opini audit, dan karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, Priharjanto & Wardani (2017) menyatakan tingkat penyimpangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi dimana tingkat penyimpangan yang besar tidak serta merta mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan. Dapat diketahui juga bahwa rekomendasi serta koreksi yang diberikan BPK sebagai upaya peningkatan pengungkapan laporan keuangan belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi & Martani (2016) menunjukkan hasil yang

berbeda dengan hasil penelitian ini, dimana hasil yang diperoleh yaitu semakin besar tingkat penyimpangan yang ditemukan oleh BPK maka tingkat pengungkapan yang dilakukan semakin besar.

4.6.4 Tingkat Ketergantungan

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan nilai sig. variabel tingkat ketergantungan (DEPEND) sebesar 0.157. Nilai sig. tersebut menyatakan tingkat ketergantungan (DEPEND) tidak signifikan pada level 5% karena nilai sig. yang diperoleh sebesar 0.157 lebih besar dari 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan (DEPEND) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa besaran dana transfer yang diperoleh oleh suatu pemerintah provinsi dari pemerintah pusat tidak akan mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tersebut. Tidak adanya tuntutan dari pemerintah pusat menjadi faktor tidak berpengaruhnya tingkat ketergantungan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hilmi & Martani (2016) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tidak terlalu erat dalam era desentralisasi menyebabkan tidak adanya monitoring khusus pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi oleh Pemerintah Pusat. Jika terdapat monitoring dana transfer ke pemerintah provinsi, diharapkan bisa mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Priharjanto & Wardani (2017) juga menyatakan hal yang senada dimana tingkat ketergantungan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. Hal tersebut diperkuat dari komposisi

pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke daerah sebagian besar berupa dana alokasi umum yang penetapan anggaran maupun pencairannya tidak mempertimbangkan laporan penggunaan dana. Berbeda dengan dana alokasi khusus yang penetapan alokasi dan pencairannya mempertimbangkan laporan penggunaan dana.



BAB V

PENUTUP

Pada bab ini dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi, serta keterbatasan penelitian dan saran bagi pengguna penelitian di masa yang akan datang.

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil ini menunjukkan apabila indeks pembangunan manusia (IPM) suatu provinsi mengalami peningkatan maka tingkat pengungkapan laporan keuangan pada provinsi tersebut juga akan mengalami peningkatan dan juga berlaku sebaliknya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengungkapan laporan keuangan akan mendorong pemerintah untuk semakin transparan dan akuntabel dalam pengungkapan laporan keuangan.

Berbeda dengan indeks pembangunan manusia, ukuran legislatif tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak tidaknya jumlah anggota legislatif suatu pemerintah provinsi tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tersebut, akan tetapi lebih kepada bagaimana kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota legislatif itu sendiri. Semakin baik kualitas para wakil rakyat maka diharapkan bisa membuat meningkatnya kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.

Tingkat Penyimpangan juga tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Sesuai dengan teori *signalling* di mana suatu pemerintah provinsi akan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan dengan memberikan pengungkapan informasi yang lengkap dengan tidak terpengaruh akan besar atau

kecilnya tingkat penyimpangan yang terjadi pada provinsi tersebut. Pemerintahan yang baik memang diharapkan untuk selalu mengungkapkan laporan keuangan meskipun terjadi penyimpangan pada provinsi tersebut.

Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa besaran dana transfer yang diperoleh oleh suatu pemerintah provinsi dari pemerintah pusat tidak akan mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi tersebut. Tidak adanya tuntutan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi menjadi faktor tidak berpengaruhnya tingkat ketergantungan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa indeks pembangunan manusia pada suatu provinsi sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, IPM tertinggi diperoleh Provinsi DKI Jakarta dengan skor 80.47 pada tahun 2018 dan IPM terendah diperoleh Provinsi Papua Barat dengan skor 58.05 pada tahun 2016. Selisih skor yang relatif besar antara IPM tertinggi dan terendah harusnya mendorong pemerintah untuk meratakan pembangunan di Indonesia. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa kualitas manusia sangat berpengaruh dan cenderung mendorong pemerintah provinsi untuk bekerja lebih baik lagi khususnya dalam pengungkapan laporan keuangan.

5.3 Keterbatasan & Saran

Dalam penelitian ini hanya menggunakan periode yang relatif pendek yaitu tahun 2016-2018, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan periode yang lebih

panjang agar dapat mengetahui keberagaman tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga tidak mempertimbangkan tingkat pemahaman akan Standar Akuntansi Pemerintahan mengingat setiap provinsi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2), penelitian ini mendapatkan nilai yang tidak cukup tinggi yaitu sebesar 10%, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini, variabel Tingkat Penyimpangan belum begitu mewakili pengguna laporan keuangan pemerintah provinsi dari pihak lembaga pengawas, sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel lain yang lebih mewakili pengguna laporan keuangan dari pihak lembaga pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnecia, H., Simbolon, U., Kurniawan, C. H., Ekonomi, F., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 54–70. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i2.7815>
- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Elex Media Komputindo.
- Badan Pusat Statistik. (2019a). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>
- Badan Pusat Statistik. (2019b). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab2>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Ghozali, I., & Cahriri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 25–33.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 1–26. <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4301>
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Marliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-JRA*, 07(01), 32–45. <https://doi.org/10.1186/1476-4598-10-45>
- Peraturan pemerintah No 71 tahun 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010*. 1–30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Info Artha*, 1(1), 97. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i1.72>
- Putri, W. M., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1111–1130.
- Qoyimah, S. N. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, A., & Mardiana, A. (2016). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan

Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating Pada LKPD Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1(1), 169–192.

Rahmayanti, D. (2018). *Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.

Ross, S. A. (1977). The Determination of Financial Structure: The Incentive-Signalling Approach. *The Bell Journal of Economics*, 8(1), 23–40.

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>

Setyowati, L. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Esensi*, 6(1), 45–62. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3120>

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media.

Sujarweni, V. W., & Endrayanto, P. (2013). *Statistik Untuk Penelitian*. Graha Ilmu.

Suwardjono. (2006). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (3rd ed.). BPF.

Yulianingtyas, R. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. In *Universitas Surakarta, Maret*. Universitas Sebelas Maret.

LAMPIRAN 1

Indeks Pembangunan Manusia

No.	Provinsi	IPM		
		2016	2017	2018
1	Aceh	70,00	70,60	71,19
2	Sumatra Utara	70,00	70,57	71,18
3	Sumatra Barat	70,73	71,24	71,73
4	Riau	71,20	71,79	72,44
5	Kepulauan Riau	73,99	74,45	74,84
6	Jambi	69,62	69,99	70,65
7	Bengkulu	69,33	69,95	70,64
8	Sumatra Selatan	68,24	68,86	69,39
9	Kepulauan Bangka Belitung	69,55	69,99	70,67
10	Lampung	67,65	68,25	69,02
11	Banten	70,96	71,42	71,95
12	Jawa Barat	70,05	70,69	71,30
13	Jakarta	79,60	80,06	80,47
14	Jawa Tengah	69,98	70,52	71,12
15	Yogyakarta	78,38	78,89	79,53
16	Jawa Timur	69,74	70,27	70,77
17	Bali	73,65	74,30	74,77
18	Nusa Tenggara Barat	65,81	66,58	67,30
19	Nusa Tenggara Timur	63,13	63,73	64,39
20	Kalimantan Barat	65,88	66,26	66,98
21	Kalimantan Selatan	69,05	69,65	70,17
22	Kalimantan Tengah	69,13	69,79	70,42
23	Kalimantan Timur	74,59	75,12	75,83
24	Kalimantan Utara	69,20	69,84	70,56
25	Gorontalo	66,29	67,01	67,71
26	Sulawesi Barat	63,60	64,30	65,10
27	Sulawesi Selatan	69,76	70,34	70,90
28	Sulawesi Tengah	67,47	68,11	68,88
29	Sulawesi Tenggara	69,31	69,86	70,61
30	Sulawesi Utara	71,05	71,66	72,20
31	Maluku	67,60	68,19	68,87
32	Maluku Utara	66,63	67,20	67,76
33	Papua Barat	62,21	62,99	63,74
34	Papua	58,05	59,09	60,06

LAMPIRAN 2

Ukuran Legislatif

No.	Provinsi	Ukuran Legislatif
		2016-2018
1	Aceh	81
2	Sumatra Utara	100
3	Sumatra Barat	65
4	Riau	65
5	Kepulauan Riau	45
6	Jambi	55
7	Bengkulu	45
8	Sumatra Selatan	75
9	Kepulauan Bangka Belitung	45
10	Lampung	85
11	Banten	85
12	Jawa Barat	100
13	Jakarta	106
14	Jawa Tengah	100
15	Yogyakarta	55
16	Jawa Timur	100
17	Bali	55
18	Nusa Tenggara Barat	65
19	Nusa Tenggara Timur	65
20	Kalimantan Barat	65
21	Kalimantan Selatan	55
22	Kalimantan Tengah	45
23	Kalimantan Timur	55
24	Kalimantan Utara	35
25	Gorontalo	45
26	Sulawesi Barat	45
27	Sulawesi Selatan	85
28	Sulawesi Tengah	45
29	Sulawesi Tenggara	45
30	Sulawesi Utara	45
31	Maluku	45
32	Maluku Utara	45
33	Papua Barat	56
34	Papua	69

LAMPIRAN 3

Tingkat Penyimpangan

Provinsi	Tingkat Penyimpangan								
	2016			2017			2018		
	Nominal Penyimpangan	Total Belanja	Dev	Nominal Penyimpangan	Total Belanja	Dev	Nominal Penyimpangan	Total Belanja	Dev
Aceh	Rp 3.574.732.023,65	Rp 12.119.713.196.647,00	0,0003	Rp 369.265.238.051,93	Rp13.832.848.610.133,20	0,0267	Rp 32.619.385.291,34	Rp 12.306.306.187.481,20	0,0027
Sumatra Utara	Rp 25.590.165.825,00	Rp 6.701.774.898.173,50	0,0038	Rp 20.992.138.975,58	Rp10.489.397.363.653,00	0,0020	Rp 45.715.195.732,57	Rp 10.993.656.938.251,00	0,0042
Sumatra Barat	Rp 17.520.017.634,00	Rp 4.504.037.258.760,43	0,0039	Rp 3.915.640.485,96	Rp 5.759.818.392.400,62	0,0007	Rp 965.408.193,68	Rp 6.267.861.683.291,09	0,0002
Riau	Rp 20.667.913.820,30	Rp 8.731.938.149.823,90	0,0024	Rp 12.790.585.381,04	Rp 9.188.741.983.688,14	0,0014	Rp 9.957.307.906,61	Rp 8.469.560.058.792,41	0,0012
Kepulauan Riau	Rp 2.698.720.677,35	Rp 2.865.884.362.891,34	0,0009	Rp 803.921.600,41	Rp 3.272.498.783.538,13	0,0002	Rp 3.181.616.540,35	Rp 3.419.789.812.825,19	0,0009
Jambi	Rp 1.871.220.000,00	Rp 3.294.484.968.672,84	0,0006	Rp 8.151.621.767,99	Rp 4.132.941.881.087,37	0,0020	Rp 14.261.500.000,00	Rp 4.198.255.718.275,31	0,0034
Bengkulu	Rp 48.786.509.165,60	Rp 2.029.690.295.480,35	0,0240	Rp 14.899.981.457,38	Rp 2.867.213.326.855,96	0,0052	Rp 3.692.472.584,27	Rp 2.979.578.236.902,23	0,0012
Sumatra Selatan	Rp 1.515.196.711.709,33	Rp 4.962.572.330.784,01	0,3053	Rp 89.883.963.872,00	Rp 6.409.382.404.458,31	0,0140	Rp 9.436.003.863,90	Rp 7.941.143.670.101,78	0,0012
Kepulauan Bangka Belitung	Rp 1.101.280.500,00	Rp 2.069.868.292.386,32	0,0005	Rp 3.203.407.191,00	Rp 2.359.078.163.818,47	0,0014	Rp 834.077.000,00	Rp 2.364.345.563.586,80	0,0004
Lampung	Rp 2.225.612.183,70	Rp 5.476.921.595.654,51	0,0004	Rp 15.957.488.204,00	Rp 6.948.838.067.137,69	0,0023	Rp 6.012.886.421,98	Rp 7.538.988.966.120,03	0,0008
Banten	Rp 7.419.591.509,08	Rp 8.925.813.442.214,00	0,0008	Rp 219.185.866,16	Rp 9.512.813.119.364,20	0,00002	Rp 2.307.880.438,49	Rp 9.992.819.311.365,34	0,0002
Jawa Barat	Rp 9.720.259.316,16	Rp 27.621.964.467.242,00	0,0004	Rp 10.366.975.411,42	Rp32.706.749.485.376,60	0,0003	Rp 7.564.062.790,20	Rp 33.333.824.961.824,30	0,0002
Jakarta	Rp 217.510.000.000,00	Rp 47.128.810.245.854,00	0,0046	Rp 172.777.383.588,77	Rp51.066.081.379.887,00	0,0034	Rp 8.538.619.724,58	Rp 61.410.121.851.157,00	0,0001
Jawa Tengah	Rp 38.856.170.412,00	Rp 19.354.374.825.983,00	0,0020	Rp 266.105.781.373,00	Rp22.884.713.018.754,00	0,0116	Rp 4.461.089.706,30	Rp 24.478.632.557.339,00	0,0002
Yogyakarta	Rp 108.010.409,81	Rp 3.847.962.965.846,72	0,00003	Rp 6.767.396.239,39	Rp 4.920.626.776.618,68	0,0014	Rp 7.053.954.192,80	Rp 5.296.403.530.714,17	0,0013
Jawa Timur	Rp 4.650.980.437,59	Rp 23.859.953.926.118,00	0,0002	Rp 7.763.516.610,83	Rp28.878.134.635.610,30	0,0003	Rp 1.301.975.483.427,59	Rp 30.662.093.021.869,80	0,0425
Bali	Rp 1.279.598.319,11	Rp 5.420.933.529.303,53	0,0002	Rp 172.797.515,65	Rp 6.070.536.923.735,28	0,00003	Rp 11.786.966.348,43	Rp 5.998.547.032.281,81	0,0020
Nusa Tenggara Barat	Rp 5.325.532.299,61	Rp 3.764.301.951.074,96	0,0014	Rp 6.448.294.013,10	Rp 5.255.320.273.857,03	0,0012	Rp 1.306.359.362,06	Rp 5.239.531.399.449,77	0,0002
Nusa Tenggara Timur	Rp 7.295.312.881,00	Rp 3.702.912.449.649,00	0,0020	Rp 999.788.202,06	Rp 4.634.876.188.617,57	0,0002	Rp 1.044.834.648.665,25	Rp 4.846.839.267.377,67	0,2156
Kalimantan Barat	Rp 1.570.913.846.239,35	Rp 4.320.618.793.066,07	0,3636	Rp 374.071.043.550,00	Rp 5.259.793.610.869,19	0,0711	Rp 1.452.046.808.089,00	Rp 5.341.404.834.196,55	0,2718
Kalimantan Selatan	Rp 1.196.785.089,89	Rp 5.178.766.888.168,00	0,0002	Rp 73.306.507.596,32	Rp 5.845.800.626.741,18	0,0125	Rp 1.437.903.050,00	Rp 6.082.587.192.592,21	0,0002
Kalimantan Tengah	Rp 1.871.616.304,00	Rp 3.174.705.762.282,97	0,0006	Rp 6.276.250.464,98	Rp 3.686.889.215.701,55	0,0017	Rp 9.666.374.727,95	Rp 4.547.699.750.661,37	0,0021
Kalimantan Timur	Rp 339.637.259,32	Rp 7.601.242.338.859,40	0,00004	Rp 8.826.902.565,00	Rp 8.227.956.959.422,14	0,0011	Rp 862.225.346,97	Rp 9.345.057.063.690,99	0,0001
Kalimantan Utara	Rp 3.771.904.027,58	Rp 2.556.533.716.396,87	0,0015	Rp 2.652.450.203,04	Rp 2.454.188.857.402,03	0,0011	Rp 3.350.981.323,40	Rp 2.352.884.155.459,48	0,0014
Gorontalo	Rp 7.619.150.285,00	Rp 1.595.894.748.733,70	0,0048	Rp 680.825.829,46	Rp 1.738.195.528.213,44	0,0004	Rp 7.178.446.905,00	Rp 1.828.164.979.479,98	0,0039
Sulawesi Barat	Rp 1.658.701.600,00	Rp 1.765.977.558.869,00	0,0009	Rp 6.975.139.154,00	Rp 1.927.377.319.820,84	0,0036	Rp 3.209.969.655,81	Rp 1.746.622.067.295,98	0,0018
Sulawesi Selatan	Rp 3.958.888.840,05	Rp 6.930.978.668.388,43	0,0006	Rp 5.068.270.067,16	Rp 8.892.158.631.536,48	0,0006	Rp 445.687.800,00	Rp 9.332.152.987.944,74	0,00005
Sulawesi Tengah	Rp 1.623.390.396,60	Rp 3.178.114.481.726,24	0,0005	Rp 21.894.249.542,56	Rp 3.445.777.071.450,82	0,0064	Rp 35.678.179.154,74	Rp 3.628.013.037.630,17	0,0098
Sulawesi Tenggara	Rp 2.189.510.513,10	Rp 2.663.870.374.405,56	0,0008	Rp 137.148.589.036,69	Rp 3.554.111.159.551,93	0,0386	Rp 51.784.689.219,42	Rp 3.586.474.436.543,00	0,0144
Sulawesi Utara	Rp 224.273.370.307,00	Rp 2.801.145.395.510,00	0,0801	Rp 6.964.440.394,12	Rp 3.580.571.793.429,00	0,0019	Rp 1.771.728.034,00	Rp 3.656.101.961.037,95	0,0005
Maluku	Rp 12.535.463.506,32	Rp 2.573.826.897.671,38	0,0049	Rp 6.909.839.936,68	Rp 2.844.169.583.139,21	0,0024	Rp 33.276.417.134,79	Rp 3.068.953.726.756,51	0,0108
Maluku Utara	Rp 4.659.627.950,00	Rp 2.024.033.802.464,79	0,0023	Rp 41.092.559.529,87	Rp 2.258.807.481.032,00	0,0182	Rp 1.381.400.715,03	Rp 2.436.771.027.417,69	0,0006
Papua Barat	Rp 48.162.915.893,00	Rp 6.464.612.242.303,00	0,0075	Rp 2.454.070.000,00	Rp 7.016.193.285.404,00	0,0003	Rp 3.435.847.112,60	Rp 6.947.065.392.851,36	0,0005
Papua	Rp 10.163.900.000,00	Rp 11.968.494.421.588,00	0,0008	Rp 30.349.517.840,00	Rp13.303.282.243.301,00	0,0023	Rp 34.851.502.621,00	Rp 13.186.886.938.770,00	0,0026

LAMPIRAN 4

Tingkat Ketergantungan

No.	Provinsi	Tingkat Ketergantungan								
		2016			2017			2018		
		Dana Transfer	Total Pendapatan	Depend	Dana Transfer	Total Pendapatan	Depend	Dana Transfer	Total Pendapatan	Depend
1	Aceh	Rp 10.299.718.891.940,00	Rp 12.364.563.976.147,30	0,83	Rp 12.009.017.278.818,00	Rp 14.350.990.515.016,70	0,84	Rp12.065.901.692.555,00	Rp 14.427.783.075.798,70	0,84
2	Sumatra Utara	Rp 5.258.940.079.069,00	Rp 10.440.618.930.401,00	0,50	Rp 6.928.134.939.913,00	Rp 12.234.837.881.539,10	0,57	Rp 7.055.134.429.266,00	Rp 12.703.058.587.891,90	0,56
3	Sumatra Barat	Rp 2.618.608.271.110,00	Rp 4.624.674.545.939,55	0,57	Rp 3.918.754.921.982,00	Rp 6.066.826.853.956,41	0,65	Rp 4.002.064.210.887,00	Rp 6.292.287.631.025,90	0,64
4	Riau	Rp 3.829.481.733.335,00	Rp 6.942.926.673.091,52	0,55	Rp 4.539.386.717.184,00	Rp 7.902.473.692.383,29	0,57	Rp 4.836.923.284.845,00	Rp 8.478.991.024.966,15	0,57
5	Kepulauan Riau	Rp 1.612.089.029.643,00	Rp 2.914.857.620.562,68	0,55	Rp 2.156.268.926.862,00	Rp 3.252.237.500.366,54	0,66	Rp 2.278.002.977.357,00	Rp 3.500.007.224.302,10	0,65
6	Jambi	Rp 2.159.679.608.454,00	Rp 3.394.795.872.563,54	0,64	Rp 2.723.260.588.950,00	Rp 4.311.792.610.112,36	0,63	Rp 2.754.346.967.999,00	Rp 4.412.464.565.281,27	0,62
7	Bengkulu	Rp 1.618.957.169.843,00	Rp 2.355.563.884.998,69	0,69	Rp 1.997.884.640.743,00	Rp 2.804.577.827.356,27	0,71	Rp 1.978.482.543.231,00	Rp 2.851.808.282.196,75	0,69
8	Sumatra Selatan	Rp 4.022.114.607.509,00	Rp 6.582.780.929.676,33	0,61	Rp 4.061.113.371.545,00	Rp 8.195.968.131.799,96	0,50	Rp 5.577.767.500.414,00	Rp 9.141.371.395.099,79	0,61
9	Kepulauan Bangka Belitung	Rp 1.375.001.313.345,00	Rp 1.958.888.258.137,25	0,70	Rp 1.539.960.002.502,00	Rp 3.308.014.599.465,60	0,47	Rp 1.694.218.759.243,00	Rp 2.630.426.303.557,88	0,64
10	Lampung	Rp 3.209.500.044.538,00	Rp 5.588.722.511.301,34	0,57	Rp 2.668.010.093.861,00	Rp 6.813.755.009.492,40	0,39	Rp 2.832.047.343.283,00	Rp 7.098.983.642.603,13	0,40
11	Banten	Rp 3.185.553.940.739,00	Rp 8.656.395.495.445,00	0,37	Rp 3.930.029.963.372,00	Rp 9.706.065.383.439,34	0,40	Rp 3.978.289.425.586,00	Rp 10.320.366.318.359,70	0,39
12	Jawa Barat	Rp 10.627.671.443.683,00	Rp 28.042.778.716.974,20	0,38	Rp 13.995.293.674.034,70	Rp 38.586.324.742.374,10	0,36	Rp14.241.750.403.584,00	Rp 35.304.717.561.808,80	0,40
13	Jakarta	Rp 15.271.661.452.714,00	Rp 53.784.706.312.513,00	0,28	Rp 18.969.291.389.929,00	Rp 64.823.887.369.820,00	0,29	Rp17.855.177.072.924,00	Rp 61.235.824.747.633,00	0,29
14	Jawa Tengah	Rp 8.056.244.781.983,00	Rp 19.632.577.136.889,70	0,41	Rp 11.117.984.434.093,00	Rp 23.703.174.631.507,00	0,47	Rp10.968.474.152.733,00	Rp 24.702.318.190.582,30	0,44
15	Yogyakarta	Rp 2.215.906.007.176,00	Rp 3.899.192.985.313,51	0,57	Rp 3.218.782.586.692,00	Rp 5.085.241.219.288,27	0,63	Rp 3.328.773.835.982,00	Rp 5.443.179.144.512,93	0,61
16	Jawa Timur	Rp 9.101.368.472.466,56	Rp 24.962.122.477.069,50	0,36	Rp 12.501.548.645.633,00	Rp 29.864.031.011.506,20	0,42	Rp13.379.419.369.272,20	Rp 31.939.187.379.442,50	0,42
17	Bali	Rp 2.202.932.495.799,65	Rp 5.249.017.754.255,86	0,42	Rp 2.578.034.863.851,26	Rp 5.992.161.668.458,44	0,43	Rp 2.535.479.973.047,00	Rp 6.259.367.608.393,14	0,41
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 2.588.032.589.905,00	Rp 3.949.996.798.342,97	0,66	Rp 3.322.321.605.306,00	Rp 5.083.156.004.900,00	0,65	Rp 3.270.925.230.010,00	Rp 4.941.246.974.628,53	0,66
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 2.839.657.758.567,00	Rp 3.875.554.164.669,06	0,73	Rp 3.643.692.862.110,00	Rp 4.700.213.492.589,00	0,78	Rp 3.680.327.636.180,00	Rp 4.781.089.962.593,22	0,77
20	Kalimantan Barat	Rp 2.825.315.939.328,00	Rp 4.494.428.711.520,47	0,63	Rp 3.442.225.962.152,00	Rp 5.389.204.121.647,12	0,64	Rp 3.462.831.829.650,00	Rp 5.660.058.614.040,63	0,61
21	Kalimantan Selatan	Rp 2.682.349.255.301,00	Rp 5.218.654.285.851,83	0,51	Rp 2.719.723.930.644,00	Rp 5.609.663.321.766,66	0,48	Rp 2.999.439.751.663,00	Rp 6.592.642.996.631,70	0,45
22	Kalimantan Tengah	Rp 1.878.977.521.255,00	Rp 3.548.504.778.637,35	0,53	Rp 2.588.405.454.988,00	Rp 4.098.485.315.190,70	0,63	Rp 3.037.932.303.222,00	Rp 4.678.157.675.829,01	0,65
23	Kalimantan Timur	Rp 3.946.626.961.365,00	Rp 7.985.727.918.251,11	0,49	Rp 3.555.558.173.688,00	Rp 8.158.103.650.157,47	0,44	Rp 4.853.761.786.447,00	Rp 10.669.542.801.846,20	0,45
24	Kalimantan Utara	Rp 1.659.437.612.000,00	Rp 2.316.135.096.354,83	0,72	Rp 1.822.417.751.000,00	Rp 2.360.834.836.792,14	0,77	Rp 1.882.093.000.000,00	Rp 2.423.333.202.128,61	0,78
25	Gorontalo	Rp 1.272.296.403.694,00	Rp 1.584.307.613.579,81	0,80	Rp 1.424.264.276.967,00	Rp 1.773.047.305.717,38	0,80	Rp 1.415.182.154.507,00	Rp 1.800.201.701.296,61	0,79
26	Sulawesi Barat	Rp 1.409.011.534.820,00	Rp 1.720.213.668.870,97	0,82	Rp 1.532.367.605.917,00	Rp 2.122.376.241.718,24	0,72	Rp 1.515.760.142.209,00	Rp 1.819.085.595.566,52	0,83
27	Sulawesi Selatan	Rp 3.704.816.673.661,00	Rp 7.162.588.691.182,52	0,52	Rp 5.362.007.388.022,00	Rp 9.055.278.907.514,25	0,59	Rp 5.295.519.277.687,00	Rp 9.252.221.942.175,45	0,57
28	Sulawesi Tengah	Rp 2.215.604.520.193,00	Rp 3.175.692.919.654,07	0,70	Rp 2.654.741.314.195,00	Rp 3.638.342.669.181,54	0,73	Rp 2.731.430.163.822,00	Rp 3.881.148.079.297,17	0,70
29	Sulawesi Tenggara	Rp 2.051.494.944.596,00	Rp 2.826.440.179.121,98	0,73	Rp 2.718.751.740.768,00	Rp 4.160.882.974.263,88	0,65	Rp 2.881.613.470.991,00	Rp 3.901.620.473.009,76	0,74
30	Sulawesi Utara	Rp 1.888.891.560.799,00	Rp 2.885.186.120.406,00	0,65	Rp 2.573.881.355.193,00	Rp 3.731.901.683.007,00	0,69	Rp 2.525.976.743.486,00	Rp 3.779.781.721.312,74	0,67
31	Maluku	Rp 2.081.103.610.675,00	Rp 2.547.550.608.749,09	0,82	Rp 2.377.629.513.532,00	Rp 2.617.045.167.665,85	0,91	Rp 2.608.564.395.859,00	Rp 3.074.608.120.190,74	0,85
32	Maluku Utara	Rp 1.722.859.802.616,00	Rp 2.022.296.143.264,76	0,85	Rp 1.880.411.584.556,00	Rp 2.275.580.346.077,14	0,83	Rp 2.100.780.628.346,00	Rp 2.489.067.421.493,17	0,84
33	Papua Barat	Rp 6.401.575.518.351,00	Rp 6.740.386.627.579,89	0,95	Rp 6.587.919.354.954,00	Rp 7.058.391.757.888,00	0,93	Rp 6.850.595.124.081,00	Rp 7.309.838.197.631,30	0,94
34	Papua	Rp 11.542.875.532.914,00	Rp 12.567.839.768.232,00	0,92	Rp 11.985.703.424.562,00	Rp 13.006.812.664.926,00	0,92	Rp12.435.094.594.168,00	Rp 13.489.981.203.764,70	0,92

LAMPIRAN 5

Item Pengungkapan

No.	Item Pengungkapan	Skor
	<i>Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan & Entitas Akuntansi</i>	
1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	1
2	Domisili	1
3	Bentuk hukum	1
4	Jurisdiksi	1
5	Sifat operasi	1
6	Kegiatan Pokok	1
7	Landasan Perundangan	1
8	Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	1
	<i>Kebijakan Fiskal/Kuangan dan Ekonomi Makro</i>	
	<i>Ekonomi Makro</i>	
9	Produk Domestik Regional Bruto	1
10	Pertumbuhan Ekonomi	1
11	Tingkat Inflasi	1
12	Kebijakan Fiskal/Kuangan	1
13	Indikator Pencapaian Kerja	1
14	Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan	1
15	Hambatan Pencapaian Target Keuangan	1
	<i>Kebijakan Akuntansi</i>	
16	Entitas Pelaporan	1
17	Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	1
18	Dasar Pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan	1
19	Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan SAP	1
	<i>Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan</i>	
	<i>Laporan Realisasi Anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan)</i>	
20	Anggaran	1
21	Realisasi	1
22	Presentase Pencapaian	1
23	Penjelasan Perbedaan Anggaran dan Realisasi	1
24	Perbandingan dengan Periode Lalu	1
25	Rincian Lebih Lanjut	1
	<i>Neraca (Aset, Kewajiban, dan Ekuitas)</i>	
26	Perbandingan dengan Periode Lalu	1
27	Penjelasan perbedaan Periode Berjalan dengan Periode Lalu	1
28	Rincian Lebih Lanjut Akun	1
	<i>Laporan Arus Kas</i>	
29	Perbandingan dengan Periode Lalu	1
30	Penjelasan perbedaan Periode Berjalan dengan Periode Lalu	1
31	Rincian Lebih Lanjut Akun	1
32	Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam Lembar Muka	1
33	Pengungkapan-Pengungkapan Lain	1
34	Lampiran	1
	Total	34

LAMPIRAN 6

Skor Item Pengungkapan

No.	Provinsi	Skor Item Diungkapkan LKPD TA 2016																																		Total	Rasio					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34							
1	Aceh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	30	0,88235
2	Sumatra Utara	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	23	0,67647			
3	Sumatra Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0,82353		
4	Riau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	32	0,94118			
5	Kepulauan Riau	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	27	0,79412		
6	Jambi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33	0,97059		
7	Bengkulu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	28	0,82353		
8	Sumatra Selatan	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	29	0,85294			
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	25	0,73529		
10	Lampung	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	27	0,79412		
11	Banten	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	30	0,88235		
12	Jawa Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	31	0,91176		
13	Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	33	0,97059		
14	Jawa Tengah	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	26	0,76471
15	Yogyakarta	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	30	0,88235	
16	Jawa Timur	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	25	0,73529		
17	Bali	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	29	0,85294		
18	Nusa Tenggara Barat	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,88235	
19	Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	27	0,79412	
20	Kalimantan Barat	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	24	0,70588		
21	Kalimantan Selatan	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	30	0,88235		
22	Kalimantan Tengah	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	28	0,82353	
23	Kalimantan Timur	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	24	0,70588	
24	Kalimantan Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	26	0,76471	
25	Gorontalo	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	26	0,76471	
26	Sulawesi Barat	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	22	0,64706		
27	Sulawesi Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	30	0,88235	
28	Sulawesi Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	32	0,94118	
29	Sulawesi Tenggara	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	29	0,85294	
30	Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26	0,76471	
31	Maluku	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	27	0,79412	
32	Maluku Utara	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	31	0,91176	
33	Papua Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	28	0,82353		
34	Papua	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	28	0,82353		

No.	Provinsi	Skor Item Diungkapkan LKPD TA 2017																																		Total	Rasio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1	Aceh	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	31	0,91176	
2	Sumatra Utara	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	24	0,70588	
3	Sumatra Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	0,88235	
4	Riau	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	30	0,88235	
5	Kepulauan Riau	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	31	0,91176	
6	Jambi	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	28	0,82353	
7	Bengkulu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	30	0,88235	
8	Sumatra Selatan	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26	0,76471	
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	23	0,67647	
10	Lampung	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	27	0,79412	
11	Banten	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	26	0,76471	
12	Jawa Barat	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	29	0,85294	
13	Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	32	0,94118	
14	Jawa Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	24	0,70588	
15	Yogyakarta	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	27	0,79412	
16	Jawa Timur	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	27	0,79412
17	Bali	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	29	0,85294	
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26	0,76471	
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	24	0,70588	
20	Kalimantan Barat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	19	0,55882	
21	Kalimantan Selatan	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	27	0,79412	
22	Kalimantan Tengah	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	28	0,82353	
23	Kalimantan Timur	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	23	0,67647	
24	Kalimantan Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	31	0,91176	
25	Gorontalo	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	30	0,88235	
26	Sulawesi Barat	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	22	0,64706	
27	Sulawesi Selatan	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	23	0,67647	
28	Sulawesi Tengah	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	22	0,64706	
29	Sulawesi Tenggara	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26	0,76471	
30	Sulawesi Utara	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	29	0,85294	
31	Maluku	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	22	0,64706	
32	Maluku Utara	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	27	0,79412	
33	Papua Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26	0,76471	
34	Papua	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	26	0,76471	

No.	Provinsi	Skor Item Diungkapkan LKPD TA 2018																																		Total	Rasio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
1	Aceh	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	31	0,91176	
2	Sumatra Utara	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	25	0,73529	
3	Sumatra Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31	0,91176	
4	Riau	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	30	0,88235	
5	Kepulauan Riau	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	32	0,94118	
6	Jambi	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	29	0,85294	
7	Bengkulu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	30	0,88235	
8	Sumatra Selatan	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	25	0,73529	
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	19	0,55882	
10	Lampung	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	27	0,79412	
11	Banten	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	26	0,76471	
12	Jawa Barat	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	31	0,91176	
13	Jakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	32	0,94118	
14	Jawa Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	24	0,70588	
15	Yogyakarta	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	28	0,82353	
16	Jawa Timur	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	27	0,79412
17	Bali	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	30	0,88235	
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	27	0,79412	
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26	0,76471	
20	Kalimantan Barat	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	20	0,58824	
21	Kalimantan Selatan	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	29	0,85294	
22	Kalimantan Tengah	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	27	0,79412	
23	Kalimantan Timur	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	23	0,67647	
24	Kalimantan Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	31	0,91176	
25	Gorontalo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	31	0,91176	
26	Sulawesi Barat	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	22	0,64706	
27	Sulawesi Selatan	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	23	0,67647	
28	Sulawesi Tengah	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	25	0,73529	
29	Sulawesi Tenggara	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	27	0,79412	
30	Sulawesi Utara	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	30	0,88235	
31	Maluku	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	23	0,67647	
32	Maluku Utara	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	27	0,79412	
33	Papua Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	26	0,76471		
34	Papua	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	26	0,76471		

LAMPIRAN 7

Hasil Uji Statistik SPSS

Statistics						
		IPM	Ukuran_Legislatif	Tingkat_Ketergantungan	Tingkat_Penyimpangan	Item_Pengungkapan
N	Valid	102	102	102	102	102
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		69.76598	63.88	.623691	.016262	.801326
Median		69.98500	55.50	.634496	.001367	.794118
Std. Deviation		4.064033	20.386	.1667202	.0577212	.0934157
Variance		16.516	415.590	.028	.003	.009
Range		22.420	71	.6658	.3636	.4118
Minimum		58.050	35	.2839	.0000	.5588
Maximum		80.470	106	.9497	.3636	.9706

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.368 ^a	.135	.100	.0886336	1.811

a. Predictors: (Constant), Tingkat_Penyimpangan, Ukuran_Legislatif, IPM, Tingkat_Ketergantungan

b. Dependent Variable: Item_Pengungkapan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.049	.266		.182	.856		
	IPM	.009	.003	.408	3.114	.002	.520	1.922
	Ukuran_Legislatif	.000	.001	.098	.797	.427	.595	1.682
	Tingkat_Ketergantungan	.119	.088	.212	1.353	.179	.363	2.754
	Tingkat_Penyimpangan	-.222	.156	-.137	-1.426	.157	.963	1.038

a. Dependent Variable: Item_Pengungkapan

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08686076
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.065
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.092 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.034	.153		-.221	.825
	IPM	.001	.002	.116	.830	.409
	Ukuran_Legislatif	-6.104E-5	.000	-.025	-.189	.851
	Tingkat_Ketertgantungan	.012	.051	.040	.237	.813
	Tingkat_Penyimpangan	.032	.090	.037	.359	.720

a. Dependent Variable: abs

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.049	.266	.182	.856			
	IPM	.009	.003	.408	3.114	.002	.520	1.922
	Ukuran_Legislatif	.000	.001	.098	.797	.427	.595	1.682
	Tingkat_Ketertgantungan	.119	.088	.212	1.353	.179	.363	2.754
	Tingkat_Penyimpangan	-.222	.156	-.137	-1.426	.157	.963	1.038

a. Dependent Variable: Item_Pengungkapan

